

Siapkan Rp391 Miliar untuk Jalan dan Jembatan Food Estate

KALAMANTHANA, Pulang Pisau - Pembangunan infrastruktur untuk menunjang program food estate terus dilakukan. Dalam pelaksanaan pembangunan itu, pemerintah pusat meminta dukungan pemerintah daerah kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai harapan.

“Tadi kami menggelar rapat koordinasi sinkronisasi dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 16 Provinsi Kalteng,” kata Bupati Pulang Pisau H Edy Pratowo.

Selain Edy, rapat koordinasi sinkronisasi dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 16 Provinsi Kalteng juga dihadiri Kepala Dinas PUPR Pulpis, Plt Kepala Dinas Perhubungan Pulpis, Dinas Pertanian dan beberapa Dinas terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu Edy mengungkapkan, dukungan yang diharapkan dari pemerintah daerah kabupaten Pulang Pisau seperti memberikan penjelasan kepada masyarakat.

“Barangkali dalam pelaksanaan ada kendala, maka pemerintah daerah diharapkan turut memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kalau ada ganti rugi bisa dibicarakan,” ungkap Edy.

Edy mengungkapkan, dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dari simpang tiga desa Tarung Manuah sampai kawasan food estate di kabupaten Pulang Pisau, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp391 miliar lebih.

Anggaran itu, menurutnya, untuk penanganan jalan dan jembatan di Kawasan Program Ketahanan Nasional itu.

“Ada lima titik jembatan dan jalan sepanjang 41 kilometer. Kita patut bersyukur dan mendukung pembangunan ruas jalan itu. Anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat sangat besar,” ucap Edy.

Ia juga mengungkapkan, untuk ruas jalan tersebut nanti dengan lebar enam meter untuk aspalnya saja. Belum bahu jalan.

Bayangkan nanti kalau pembangunan jalan ini selesai, maka transportasi masyarakat dari Belanti ke Pulang Pisau akan sangat lancar dan kawasan tersebut akan semakin ramai.

“Kita sudah minta DPUPR Pulpis selalu berkoordinasi dengan BBPJN dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 16 Provinsi Kalteng agar sinergitas peningkatan infrastruktur di wilayah Food Estate segera meningkat,” tutupnya.

Sumber:

1. <https://www.kalamanthana.id>, *Siapkan Rp391 Miliar untuk Jalan dan Jembatan Food Estate*, Jumat, 5 Februari 2021:
2. *Harian Kalteng Pos*, *Rp391 Miliar Untuk Jalan Food Estate*, Jumat, 5 Februari 2021.

Catatan Berita:

- Pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate disebutkan bahwa Penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan Food Estate dengan mekanisme penetapan KHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan pada:
 - a. kawasan Hutan Lindung; dan/atau
 - b. Kawasan Hutan Produksi
- Pada Pasal 20 ditegaskan bahwa penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan Food Estate dalam mendukung Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilakukan pada Kawasan Hutan:
 - a. yang telah dibebani hak pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang kehutanan;
 - b. yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan, setelah dikeluarkan dari areal kerjanya; dan
 - c. yang telah dicadangkan atau telah dibebani izin perhutanan sosial atau telah dicadangkan untuk tanah objek reformasi agraria (TORA) dengan menyesuaikan program yang berorientasi pada rakyat dan reforma agraria.

Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate